E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis Prioritas Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai Kota Bontang

Desna Novia Santika[1], Gusti Haqiqiansyah[2], Doni Darmasetiadi[3]
[1]Universitas Mulawarman, Indonesia, desnanovia48@gmail.com
[2]Universitas Mulawarman, Indonesia, gusti.haqiqiansyah@fpik.unmul.ac.id
[3]Universitas Mulawarman, Indonesia, doni.darmasetiadi@fpik.unmul.ac.id

Abstrak

Mangrove Edu Park yang berada di Berbas Pantai, wilayah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang adalah area ekowisata yang fokus pada kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan, perlu adanya pengelolaan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menetapkan prioritas dalam kebijakan pengelolaan kawasan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, sera kuesioner yang ditujukan kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, Kelurahan Berbas Pantai, Pokdarwis, penduduk setempat, dan para nelayan. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang mengacu pada lima aspek, yaitu konservasi lingkungan, pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi, dan pemberdayaan kelompok yang rentan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek manfaat ekonomi menjadi prioritas utama dalam pengelolaan ekowisata, diikuti oleh konservasi lingkungan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan kelompok yang rentan, serta pelestarian budaya. Di sisi lain, alternatif yang dianggap paling penting adalah pengembangan destinasi wisata yang berbasis maritim dan ramah lingkungan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan ekowisata mangrove yang berkelanjutan, serta meningkatkan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat di sekitar.

Kata Kunci: *Kebijakan Pengelolaan, Ekowisata Mangrove, AHP, Mangrove Edu Park,Pariwisata Berkelanjutan*

Abstract

Mangrove Edu Park located in Berbas Pantai, Bontang Selatan District, Bontang City is an ecotourism area that focuses on conservation activities and environmental education, it needs sustainable management. The purpose of this study is to analyze and set priorities in the management policy of the area. Data collection was carried out through interviews, observations, and questionnaires addressed to the Bontang City Youth, Sports and Tourism Office, Berbas Pantai Village, Pokdarwis, local residents, and fishermen. Data analysis was carried out using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method which refers to five aspects, namely environmental conservation, cultural preservation, community participation, economic benefits, and empowerment of vulnerable groups. The findings of this study show that the aspect of economic benefits is the main priority in ecotourism management, followed by environmental conservation, community participation, empowerment of vulnerable groups, and cultural preservation. On the other hand, the alternative that is considered the most important is the development of tourist destinations that are maritime-based and environmentally friendly. This policy is expected to strengthen sustainable mangrove ecotourism management, as well as increase economic, social, and environmental benefits for the surrounding community.

Keywords: *Management Policy, Mangrove Ecotourism, AHP, Mangrove Edu Park, Sustainable Tourism*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Corresponding Author:
Desna Novia Santika
Universitas Mulawarman, desnanovia48@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang sangat baik untuk mengembangkan ekowisata di daerah pesisir, terutama di area yang memiliki ekosistem mangrove. Mangrove mempunyai peran yang signifikan sebagai pelindung dari abrasi pantai, menyerap karbon, menahan sedimen, serta memberikan habitat bagi berbagai spesies perairan (Majid *et al.,* 2016). Pemanfaatan mangrove dengan pendekatan ekowisata dianggap dapat menyelaraskan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup penduduk yang bermukim di tepi pantai (Sabir, 2020).

Ekowisata adalah bentuk perjalanan yang fokus pada pelestarian lingkungan, penguatan komunitas lokal, serta pendiikan tentang lingkungan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan penduduk seempat (Pradyana *et al.,* 2024). Dalam praktiknya, pengembangan ekowisata mengikuti prinsip-prinsip konservasi, pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, menciptakan keuntungan ekonomi, dan meningkatkan pemberdayaan kelompok yang rentan (Nazaret *et al.,* 2023). Oleh karena itu, pengelolaan kawasan ekowisata memerlukan kebijakan yang seimbang antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Salah satu lokasi yang dihadirkan sebagai ekowisata yang berorientasi pada konservasi di Bontang aalah Mangrove Edu Park Berbas Pantai (Sutiarso, 2017). Area ini dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang dengan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan fungsi wisata dan edukasi lingkungan (Toar dan Umilia, 2021). Namun, pengelolaannya masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti masalah limbah, kurangnya sumber daya manusia, dan pemeliharaan fasilitas yang belum berjalan maksimal.

Pentingnya menetapkan prioritas kebijakan sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), adalah salah satu pendekatan yang membantu dalam pengambilan keputusan dengan menetukan prioritas berdasarkan berbagai kriteria yang saling terkait (Dahlan *et al.,* 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kebijakan dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai di Bontang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, keuntungan ekonomi, dan pemberdayaan komunitas rentan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di area Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna menganalisis prioritas kebijakan dalam pengelolaan ekowisata mangrove berdasarkan keadaan di lapangan. Para responden dalam penelitian

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden dengan alasan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat 9 responden yang berasal dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, Kelurahan Berbas Pantai, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat setempat, serta para nelayan.

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan distribusi kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen, laporan, literatur, dan regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan ekowisata mangrove.

Untuk menganalisis data, digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guna untukmenetapkan prioritas kebijakan pada pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai. Analisis ini mempertimbangkan lima aspek utama ekowisata, yakni konservasi lingkungan, pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi, dan pemberdayaan kelompok-kelompok rentan. Data yang diperoleh dari penilaian responden diproses menggunakan perangkat lunak Expert Choice untuk menentukan bobot prioritas paa setiap aspek dan alternatif kebijakan, sehingga dapat ditetapkan prioritas kebijakan pengelolaan yang mendukung keberlanjutan kawasan ekowisata mangrove.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai

Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai Adalah area wisata yang fokus pada konservasi yang terletak di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tempat ini dikembangkan sebagai Langkah untuk memanfaatkan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dengan menggabungkan fungsi konservasi, pendidikan, dan pariwisata. Pengembangan area ini dimulai pada tahun 2013 sebagai wuju nyata dari pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Kaltim Pasifik Amoniak dan saat ini dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang (Toar dan Umilia, 2021). Karena posisinya yang terletak di tepi pantai dan langsung berbatasan dengan Selat Makassar, area ini memiliki potensi sumber daya mangrove yang mendukung pengembangan ekowisata yang berbasis lingkungan.

Mangrove Edu Park Berbas Pantai, sebagai tujuan wisata yang bersifat edukatif, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti jalur papan, gazebo, jembatan kayu, tempat duduk untuk pengunjung, pagar kawasan mangrove, serta pusat penyelaman. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan aksebilitas dan kenyamanan bagi para pengunjung tanpa mengganggu fungsi ekologis dari kawasan tersebut. Berdasarkan penjelasan Waluyo *et al.,* (2025), pengelolaan ekowisata yang baik tidak hanya fokus pada pelestarian alam, tetapi juga mengajak partisipasi warga setempat dan menciptakan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas di sekitar area pariwisata. Selain berfungsi sebagai lokasi wisata, tempat ini juga digunakan sebagai media edukasi lingkungan serta kegiatan penanaman mangrove yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir.

Pengelolaan kawasan ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat setempat, dan para nelayan. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan penerapan prinsip keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata. Nazaret *et al.,* (2023) mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu prinsip utama pada ekowisata yang berfungsi untuk

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan serta meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi komunitas lokal.

Analisis Prioritas Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, data diperoleh melalui wawancara serta pengisian kuesioner oleh responden yang meliputi Dispopar Kota Bontang, Pokdarwis, pihak kelurahan, masyarakat sekitar, dan nelayan yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai. Data dari hasil penilaian responden kemudian dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak Expert Choice untuk menetapkan prioritas kebijakan pengelolaan kawasan. Dalam Mahmudah Budiatiningsih *et al.,* (2023) mengutip dari ide Cobbinah (2015) bahwa prinsip-prinsip ekowisata mencakup konservasi lingkungan, pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Berikut ini adalah hasil perhitungan bobot prioritas dari aspek-aspek pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai yang diperoleh melalui perangkat lunak Expert Choice. Nilai pembobotan tersebut didapat dari kombinasi penilaian seluruh responden dan akan disajikan pada gambar berikut.

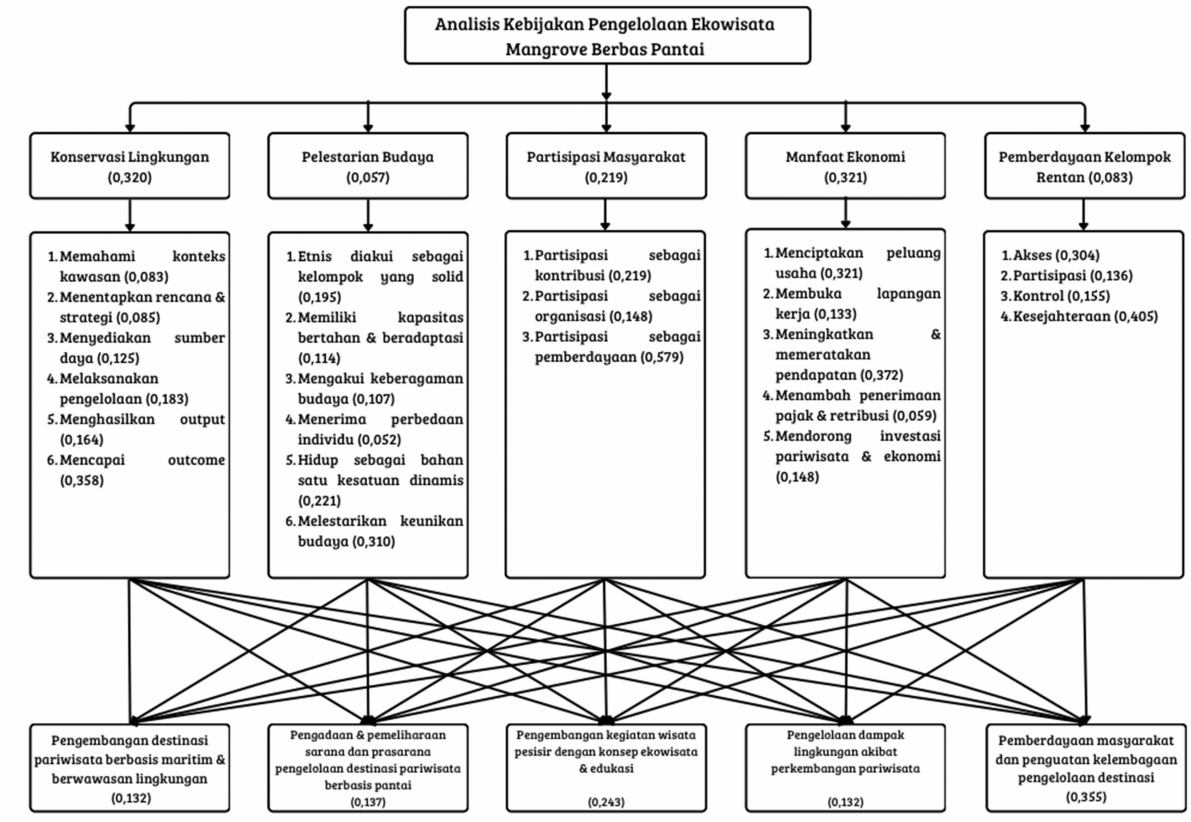

Gambar 1. Hasil Analisis Data Expert Choice

A. Analisis Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

1. Aspek Konservasi Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) menunjukkan bahwa pada konservasi lingkungan, sub kriteria yang mencapai outcome memiliki bobot tertinggi sebesar 0,358. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai lebih difokuskan pada pencapaian dampak nyata, seperti pelestarian ekosistem mangrove dan keberlanjutan kawasan wisata, Sebaliknya, sub kriteria yang berkaitan dengan pemahaman konteks kawasan serta perencanaan dan strategi, masing-masing mendapatkan bobot terendah sebesar 0,085. Ini mengisyaratkan bahwa responden lebih menekankan pada hasil akhir pengelolaan ketimbang pada tahap awal perencanaan.

Pada tingkat alternatif, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan destinasi menjadi prioritas utama pada sub kriteria yang mencapai outcome dengan hasil 0,336. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada alternatif pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis maritim dan berwawasan lingkungan dalam sub kriteria penyediaan sumber daya (inputs), dengan bobot sebesar 0,069. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam memberikan dampak konservasi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Hockings *et al.,* (2006), pencapaian outcome merupakan tahap akhir yang mencerminkan keseluruhan keberhasilan proses pengelolaan, mulai dari pemahaman kawasan, perencanaan, penyediaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, hingga hasil yang dihasilkan. Oleh karena itu, tingginya bobot pada sub kriteria mencapai outcome menunjukkan bahwa pengelolaan Mangrove Edu Park Berbas Pantai lebih diarahkan untuk mencapai manfaat konservasi yang nyata dan berkelanjutan.

2. Aspek Pelestarian Budaya

Hasil analisis AHP mengenai aspek pelestarian budaya menunjukkan bahwa sub kriteria melestarikan keunikan budaya memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,310. Temuan ini mengindikasihkan bahwa budaya lokal dianggap sebagai elemen penting dalam mempertahankan identitas wilayah dan juga berfungsi sebagai daya Tarik untuk mendukung pengembangan ekowisata. Di sisi lain, subkriteria menerima perbedaan individu memperoleh bobot terendah, yaitu 0,052, yang menunjukkan bahwa responden lebih mengutamakan usaha pelestarian nilai budaya yang telah ada dibandingkan dengan aspek keberagaman perilaku individu dalam interaksi sosial masyarakat.

Dalam hal alternatif, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pengelolaan destinasi meraih nilai tertinggi sebesar 0,747 pada sub kriteria etnis diakui sebagai kelompok yang solid. Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dianggap mampu menjaga kohensi sosial serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dalam pengelolaan kawasan wisata. Sebaliknya, nilai terendah ditemukan pada alternatif pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi wisata dalam subkriteria melestarikan keunikan budaya dengan nilai 0,055. Temuan ini menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak hanya

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

tergantung pada ketersediaan fasilitas fisik, tetapi lebih dipengaruhi oleh keikutsertaan masyarakat dalam mempertahankan dan mewariskan nilai budaya yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Gezentsvey (2008), yang menyatakan bahwa pelestarian budaya di kawasan wisata sangat penting untuk menjaga identitas masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai, keberadaan budaya lokal dapat menjadi komponen dari daya Tarik wisata yang mendukung keberlanjutan kawasan. Berdasarkan hal tersebut, pelestarian budaya sebaiknya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal sehingga nilai-nilai budaya lokal dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

3. Aspek Partisipasi Masyarakat

Hasil analisis AHP mengenai partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa sub kriteria partisipasi sebagai pemberdayaan memperoleh nilai tertinggi, yaitu 0,579. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden menganggap keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan kemandirian lebih penting dibandingkan bentuk partisipasi lainnya. Hal ini menandakan bahwa keberlanjutan pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut. Sebaliknya, sub kriteria partisipasi sebagai organisasi memperoleh nilai terendah, yaitu 0,148, yang menunjukkan bahwa aspek kelembagaan belum menjadi prioritas utama dibandingkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara langsung.

Pada tingkat alternatif, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pengelolaan destinasi mencata nilai tertinggi sebesar 0,494 pada subkriteria partisipasi sebagai organisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dianggap sebagai langkah paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada alternatif pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi wisata pada subkriteria partisipasi sebagai pemberdayaan dengan nilai 0,056. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat lebih dipengaruhi oleh penguatan sumber daya manusia dibandingkan dengan penyediaan fasilitas fisik. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Berdasarkan pendapat Marhum dan Meronda (2021), yang mengacu pada teori Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat tidak hanya terwujud dalam bentuk kehadiran langsung, tetapi juga dalam peran serta dalam proses pengambilan Keputusan. Selain itu, menurut Putra (2019), yang mengacu pada konsep partisipsi Oakley (1991), partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kontribusi, keterlibatan dalam organisasi, serta pemberdayaan masyarakat.

4. Aspek Manfaat Ekonomi

Hasil analisi AHP mengenai manfaat ekonomi menunjukkan bahwa subkriteria untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan memperoleh nilai tertinggi, yaitu 0,372. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pantai dianggap dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyakarat melalui peningkatan pendapatan dan distribusi manfaat yang lebih merata. Sebaliknya, subkriteria yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi memperoleh nilai terendah, yakni 0,059. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih mengedepankan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat dibandingkan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Pada tingkat alternatif, subkriteria menciptakan peluang usaha dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pengelolaan destinasi memperoleh nilai tertinggi, yaitu 0,387. Ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dianggap mampu mendorong terbentuknya berbagai aktivitas oariwisata dalam subkriteria yang mendorong investasi pariwisata dan ekonomi, dengan nilai 0,053. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi di kawasan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan peningkatan investasi. Temuan dari studi ini konsisten dengan yang dikemukakan oleh Putri *et al.,* (2022) yang merujuk pada pendapat Yoeti (2008), yang menyatakan bahwa aktivitas pariwisata bisa menambah peluang bisnis, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat di sekitar area wisata. Selain itu, Komariah *et al.,* (2018) menyatakan bahwa pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi dan kebijaksanaan lokal yang ada di daerah wisata.

5. Aspek Pemberdayaan Kelompok Rentan

Hasil analisis AHP terkait pemberdayaan kelompok rentan menujukkan bahwa subkriteria kesejahteraan memperoleh nilai tertinggi, yaitu 0,405. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan di sekitar area wisata. Sebaliknya, subkriteria partisipasi mendapatkan nilai terendah, yaitu 0,136, yang menunjukkan bahwa responden lebih mengutamakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dibaningkan dengan tingkat keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan. Hasil ini sejalan dengan penjelasan Rauf A (2010), yang mengacu pada konsep pemberdayaan Suharto (2007), bahwa tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan kelompok rentan agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mengakses sumber-sumber produktif, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Pada tingkat alternatif, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pengelolaan destinasi memperoleh nilai tertinggi, yaitu 0,479 dalam subkriteria kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dianggap dapat meningkatkan kemampuan kelompok rentan dalam mengakses, megelola, dan mengendalikan sumber daya yang aa. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada pengelolaan dampak lingkungan akibat aktifitas pariwisata di subkriteria partisipasi dengan nilai 0,069. Hal ini menunjukkan bahwa responde menilai penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat lebih efektif dalam mendorong pemberdayaan dibandingkan dengan keterlibatan kelompok rentan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Sari *et al.,* (2023), yang mengacu pada teori pemberdayaan Writhatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui proses peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan potensi, berpartisipasi aktif, dan meningkatkan kesejahteraannya. Nilai yang tinggi pada subkriteria kesejahteraan dan kontrol menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok rentan di Mangrove Edu Park Berbas Pantai lebih terfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan memiliki kontrol yang lebih dalam pengelolaan sumber daya serta kegiatan ekowisata.

B. Analisis Prioritas Kebijakan Mangrove Edu Park

Hasil analisis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi merupkaan pilihan kebijakan yang paling diutamakan dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai. Pilihan ini mendapatkan nilai tertinggi pada mayoritas aspek, karena dianggap mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat struktur kelembagaan lokal, serta mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan kawasan wisata. Selain itu, pilihan ini juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan peluang usaha, peningkatan pendapatan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan.

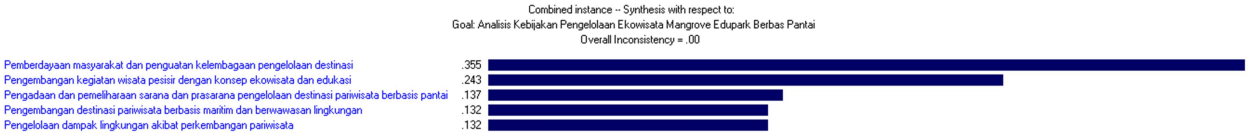

Gambar 3. Nilai Prioritas Alternatif

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), seluruh alternatif kebijakan yang dianalisis dapat diterima karena nilai *Overall Inconsistency* menunjukkan hasil yang konsisten. Menurut Ina *et al.,* (2018), hasil perhitungan AHP dianggap konsisten jika nilai *Consistency Ratio* (CR) kurang dari satu atau sama dengan 0,1. Berdasarkan gambar 1, alternatif pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan destinasi menempati prioritas tertinggi dibandingkan dengan alternatif kebijakan lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menilai keberhasilan pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai lebih dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dibandingkan dengan pembangunan fisik aau pengelolaan lingkungan secara teknis. Hal ini sejalan dengan hasil pembobotan yang menunjukkan aspek partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi, dan pemberdayaan kelompok rentan juga menempatkan alternatif tersebut sebagai prioritas utama.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan penguaan kelembagaan memegang peranan penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan masyarakat serta kelembagaan lokal dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekowisata secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

masyarakat dalam pengelolaan kawasan, memperluas peluang usaha, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih merata bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan menjadi strategi yang paling tepat untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa manfaat ekonomi menjadi prioritas utama dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai, diikuti dengan konservasi lingkungan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan, dan pelestarian budaya, Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan ekowisata tidak hanya bertujuan untuk melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi pariwisata yang berkelanjutan. Pada level subkriteria, hasil pencapaian terkait outcome, pelestarian keunikan budaya, partisipasi sebagai bentuk pemberdayaan, peningkatan serta pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan kelompok rentan menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kawasan.

Berdasarkan analisis AHP, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pengelolaan destinasi diidentifikasi sebagai prioritas kebijakan utama dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Edu Park Berbas Pantai. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mengembangkan peluang usaha berbasis ekowisata. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, mejaga kelestarian ekosistem mangrove, serta mendukung terciptanya tata kelola ekowisata yang partisipatif dan memiliki daya saing.

SARAN

Pemerintah daerah, pengelola area, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) seharusnya memberi prioritas pada program pemberdayaan masyarakat serta penguatan organisasi melalui pelatihan, bimbingan usaha, dan peningkatan kemampuan pengelolaan destinasi. Selanjutnya, perlu diadakan kegiatan wisata yang berfokus pada edukasi dan konservasi dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, sehingga manfaat yang dihasilkan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, F., Amahoru, musfira nurul, & Muslim. (2023). Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai Solusi Pembinaan Sepakbola Amatir: Literatur Review. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, *9*(2), 274–285. https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/jpkr/article/view/2962

Hockings, Marc; Stolton, Sue; Leverington, Fiona; Dudley, Nigel; Courrau, J. (2006). *Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Areas*. IUCN.

Ina, W. T., Manu, S., & Nahdi, S. A. (2018). Kombinasi Metode Profile Matching Dan Metode Analytical Hierarchy Proses (Ahp) Pada Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Aplikasi Pelelangan Jabatan Pemerintah Daerah). *Jurnal Media Elektro*,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

VII(1), 1–6. https://doi.org/10.35508/jme.v0i0.598

Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, *3*(2). https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340

Mahmudah Budiatiningsih; Baiq Nikmatul Ulya; Ihyana Hulfa. (2023). Kontekstualisasi Makna Ekowisata: Studi Kasus pada Destinasi Ekowisata. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, *12*(2), 837–844.

Majid, I., Al Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI PESISIR PANTAI KOTA TERNATE TERINTEGRASI DENGAN KURIKULUM SEKOLAH. *JURNAL BIOEDUKASI*, *4*(2). https://doi.org/10.33387/bioedu.v4i2.162

Marhum, Umar; Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial*, *2*, 141–149.

Michelle A. Gezentsvey. (2008). *Perjalanan Kontinuitas Etnokultural: Membandingkan Akulturasi Jangka Panjang Orang Yahudi dengan Maori dan Tionghoa*.

Nazaret, G., Kota, M., Lonto, A. L., Wua, T. D., Rantung, M., & Manado, U. N. (2023). *3 1,2,3*. *2*(1), 21–28.

Pradyana, I. K. Y., Damayanti, S. P., & Suteja, I. W. (2024). PENGARUH EKOWISATA BERBASIS KONSERVASI TERHADAP KONDISI EKOLOGI DI PANTAI NIPAH DESA MALAKA. *Journal Of Responsible Tourism*, *4*(1), 11–18. https://doi.org/10.47492/jrt.v4i1.3455

Putra, A. R. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu* [Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/7316/

Putri, E. D. H., Yulianto, A., Wardani, D. M., & Saputro, L. E. (2022). *Dampak Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Terhadap Ekowisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Ilmiah Pariwisata, 27(3), 317-327. 27*(3), 317–327.

Rauf A, H. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat. *Inovasi*, *7*, 240–254.

Sabir, M. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE TONGKE-TONGKE Di KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Industri Pariwisata*, *3*(1), 53–60. https://doi.org/10.36441/pariwisata.v3i1.45

Sari, A. P., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi*. *17*(5), 3067–3083.

Sutiarso, M. A. (2017). Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata. *OSFPreprint*, *September*, 1–11.

Toar, C. N., & Umilia, E. (2021). Faktor- Faktor yang Berpengaruh dalam Pengembangan Ekowisata di Mangrove Edu Park, Kelurahan Berbas Pantai, Kota Bontang Berdasarkan Preferensi Stakeholder. *Jurnal Teknik ITS*, *10*(2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.73882

Waluyo, W. B., Latifah, W. U., Fismasari, Z., & Oktafianti, E. (2025). Peran Masyarakat dalam Membangun Ketahanan Masyarakat Melalui Ekowisata Yang Sehat dan Berkelanjutan. *Action Research Literate*, *9*(1), 261–269. https://doi.org/10.46799/arl.v9i1.2626